## **ABSTRAK**

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia, ketersediaan pangan akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan dan kualitas hidup manusia. Sebagai kebutuhan pokok tentu perlu adanya keterlibatan negara untuk menjamin dan melindungi kebutuhan pangan rakyatnya. Upaya pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pangan sudah semestinya menguntungkan seluruh rakyat. Salahsatu kebijakan terbaru pemerintah mengenai pertanian adalah dikeluarkannya kartu tani. Indonesia adalah negara agraris yang harusnya dapat dijadikan modal oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan politik pangan dan upaya peningkatan kesejahteraan petani di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut berdasarkan kebijakan ekonomi politik nasional. Penelitian ini menggunakan teori Ekonomi Politik Keynesian sebagai teori utama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kualtatif. Teknik Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. Validitas data menggunakan trianggulasi data sumber.

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi salahsatu kebijakan pangan (kartu tani) di kecamatan Banjarwangi tidak berjalan dengan maksimal. BPP selaku pelaksana program kartu tani menemukan beberapa hambatan dalam melaksanakan tugasnya, selain itu PPL, Gapoktan, Poktan dan petani juga merasakan dampak yang kurang baik dari program kartu tani. Idealnya sebuah program pemerintah menguntungkan bagi masyarakat, seperti program kartu tani yang pada dasarnya dikeluarkan untuk mengatur bantuan pemerintah supaya tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan berbagai fungsinya. Akan lebih baik sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan pemerintah harus terlebih dahulu mempelajari lapangan dan melakukan sosialisasi secara umum sehingga mengurangi kemungkinan-kemungkinan munculnya hambatan yang akan merugikan pihak terkait.

Kata Kunci: Ekonomi Politik, Politik Pangan, Kesejahteraan Ekonomi Petani